

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian intern merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk membantu mencapai tujuan organisasi dimana fungsinya adalah untuk melakukan kontrol. Keberadaan pemeriksa intern sebagai bagian dari pengendalian intern, akan menjadi alat kendali yang efektif bagi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam praktiknya, pemeriksaan intern dapat dilakukan oleh beberapa staf yang dipercaya dan bertanggungjawab pada *top management* atau dibentuk oleh unit organisasi sendiri.

Dengan diberlakukannya secara efektif Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah menjadikan perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan, tugas, fungsi dan tanggung jawab lembaga serta aparatur pemerintah

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*)

Konsekuensi adanya perubahan paradigma pemerintahan tersebut ternyata menimbulkan berbagai masalah yang harus diterima oleh daerah. Kinerja instansi banyak menjadi sorotan pada akhir-akhir ini terutama sejak timbulnya iklim demokrasi dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Pengawasan yang dijalankan secara optimal dapat mencegah atau memperbaiki adanya kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian, penyelewengan dan lainnya, yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui sejauh mana tujuan pengawasan untuk memperbaiki dan mencegah jangan samapai terulang lagi di masa datang. Pengawasan secara kontinyu dapat diharapkan membantu merealisasikan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, antara lain transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas serta bebas KKN.

Pelaksanaan pengawasan dari pengendalian intern oleh lembaga pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang bupati, memiliki lingkup kegiatan dan operasional yang cukup luas sehingga membutuhkan unit

pemeriksaan intern guna memeriksa seluruh kegiatan pemerintahan. Hal ini merupakan penjabaran dari seluruh kebijakan yang digariskan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam praktiknya, bupati sebagai pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di daerahnya mendelegasikan tugas, wewenang, dan kekuasaannya kepada pejabat-pejabat di lingkungan kerjanya. Sementara adanya pengawasan merupakan konsekuensi logis dari adanya delegasi wewenang tersebut. Oleh karena itu aparat pemeriksa intern yang berbentuk fungsional yang sangat dibutuhkan oleh Bupati. Hal ini ditujukan untuk memastikan apakah keuangan daerah dimanfaatkan dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah dipergunakan secara benar dan maksimal.

Laporan pemeriksaan intern merupakan salah satu masukan kepada bupati dalam menilai apakah seluruh kebijakan telah terlaksana dengan efektif. Informasi dapat menjadi umpan balik yang berguna baik untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan maupun untuk dipergunakan dalam perencanaan untuk periode berikutnya. Kebutuhan akan informasi dapat dipenuhi jika pemerintah daerah memiliki aparat pemeriksaan fungsional yang tangguh dalam arti dapat ditugaskan melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada kepatuhan

pelaksanaan audit operasional BAWASDA Kabupaten Sleman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri yang selama ini ikut serta melakukan pengawasan atas Pemerintah Daerah dikurangi dan tugas pekerjaanya dibebankan kepada auditor internal pemerintah Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Sleman. Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Sleman sebagai salah satu lembaga auditor intern Kabupaten Sleman mempunyai tugas membantu Bupati dalam mendorong, memelihara, dan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahanan daerah yang lebih baik dan bersih sesuai keinginan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAWASDA Kabupaten Sleman saat ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana peran dari organisasi tersebut dalam usahanya untuk melaksanakan pengawasan yang profesional guna meningkatkan *efisiensi* serta *efektifitas* pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Untuk

menjawab pertanyaan ini, maka akan penulis bahas dalam skripsi yang berjudul **“EVALUASI KEPATUHAN PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL BAWASDA KABUPATEN SLEMAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti adalah apakah Pelaksanaan Audit Operasional pada BAWASADA Kabupaten Sleman sudah mematuhi Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ?

1.3 Batasan Masalah

Sasaran Pelaksanaan Audit Operasional BAWASDA Kabupaten Sleman pada tahun 2007 sebanyak 28 obyek pemeriksaan, namun pada kesempatan ini penulis membatasi hanya pada 1 obyek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BAWASDA Kabupaten Sleman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaksanaan audit operasional yang dilakukan oleh BAWASDA Kabupaten Sleman.

1.4 Tujuan Penelitian

untuk mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan audit operasional BAWASDA Kabupaten Sleman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

- a) sebagai bahan evaluasi penilaian tentang tingkat kepatuhan pelaksanaan audit operasional yang dilakukan oleh BAWASDA Kabupaten Sleman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b) untuk memberikan rekomendasi dan masukan agar kepatuhan pelaksanaan audit operasional BAWASDA Kabupaten Sleman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat ditingkatkan .

1.6 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan tiap bab terbagi dalam sub bab-sub bab dengan urutan dan pembahasan tiap-tiap bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL

Bab ini akan membahas mengenai landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan definisi tentang auditing, audit operasional, tujuan audit operasional, ruang lingkup audit operasional dan audit operasional pemerintah meliputi meliputi perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWASAN DAERAH (BAWASDA) KABUPATEN SLEMAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian; sejarah, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, ruang lingkup pemeriksaan, tanggung jawab, wewenang, sumber daya manusia yang ada, susunan tim audit dan pelaksanaan pengawasan oleh BAWASDA Kabupaten Sleman dari

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut atas hasil audit serta metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh bahan dalam rangka penyusunan skripsi.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memberikan evaluasi kepatuhan pelaksanaan audit operasional BAWASDA Kabupaten Sleman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan simpulan-simpulan atas evaluasi yang dilakukan serta akan memuat saran-saran yang mungkin dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran bagi BAWASDA Kabupaten Sleman agar mampu menjadi organisasi pengawasan yang lebih baik.